

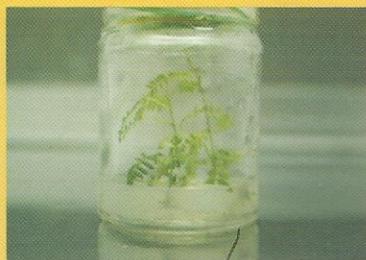
ISBN 978-602-8853-03-3

978-602-8853-07-1



PROSIDING SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN IPB 2009

Buku 4 Bidang Sosial dan Ekonomi



PROSIDING
SEMINAR HASIL-HASIL
PENELITIAN IPB
2009

Buku 4
Bidang Sosial dan Ekonomi

SUSUNAN TIM PENYUSUN

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB)
2. Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc
(Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Penelitian IPB)
- Ketua Editor : Dr. Ir. Prastowo, M.Eng
- Anggota Editor : 1. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc
2. Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr
3. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr
- Tim Teknis : 1. Drs. Dedi Suryadi
2. Euis Sartika
3. Endang Sugandi
4. Lia Maulianawati
5. Muhamad Tholibin
6. Yanti Suciati
- Desain Cover : Muhamad Tholibin

**Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009,
Bogor 22-23 Desember 2009**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Pertanian Bogor**

**ISBN : 978-602-8853-03-3
978-602-8853-07-1**

Februari 2010

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas penting LPPM IPB adalah melaksanakan seminar hasil penelitian dan mendesiminasikan hasil penelitian tersebut secara berkala dan berkelanjutan. Pada tahun 2009, sekitar 479 judul kegiatan penelitian telah dilaksanakan. Penelitian tersebut dikoordinasikan oleh LPPM IPB dari beberapa sumber dana antara lain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Departemen Pertanian (Deptan) dan Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dimana sebanyak 293 judul penelitian tersebut telah dipresentasikan dalam Seminar Hasil Penelitian IPB yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Desember 2009 di Institut Pertanian Bogor

Hasil penelitian tersebut sebagian telah dipublikasikan pada jurnal dalam/luar negeri, dan sebagian dipublikasikan pada prosiding dengan nama Prosiding Seminar Hasil-hasil Penelitian IPB 2009, yang terbagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu :

1. Bidang Pangan dan Energi
2. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Sosial dan Ekonomi
5. Bidang Teknologi dan Rekayasa Pangan
6. Bidang Teknologi dan Rekayasa Non Pangan

Melalui hasil penelitian yang telah dipublikasikan ini, runutan dan perkembangan penelitian IPB dapat diketahui, sehingga *road map* penelitian IPB dan lembaga mitra penelitian IPB dapat dipetakan dengan baik.

Kami ucapkan terima kasih pada Rektor dan Wakil Rektor IPB yang telah mendukung kegiatan Seminar Hasil-Hasil Penelitian ini, para Reviewer dan panitia yang dengan penuh dedikasi telah bekerja mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan seminar hingga penerbitan prosiding ini.

Semoga Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009 ini dapat bermanfaat bagi semua. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Bogor, Maret 2010
Kepala LPPM IPB,

Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N., M.Eng
NIP 19500301 197603 1 001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

DAFTAR JUDUL	Halaman
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Model Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) - <i>Pudji Muljono, Burhanuddin, Yannefri Bakhtiar</i>	405
Model Optimasi Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Nasional - <i>Anwar Bey Pane, Ernani Lubis Thomas Nugroho, Muhammad Syahrir R</i>	415
Pola Penyebaran Dan Mobilitas Sosial Nelayan Bugis Di Indonesia - <i>Rilus A. Kinseng, Saharuddin</i>	428
Pengembangan Model Pamong Belajar Dalam Pembinaan Industri Kecil Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - <i>Ma'mun Sarma, Herien Puspitawati, Pudji Muljono, Tasril Bartin</i>	438
Model Pemberdayaan Petani Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera (Kajian Kebijakan Dan Sosial Ekonomi Tentang Ketahanan Pangan Pada Komunitas Desa Rawan Pangan Di Jawa) - <i>Titik Sumarti</i> ...	456
Rancang Bangun Model Evaluasi Kinerja Berbasis Pengetahuan Pada Koperasi Susu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional - <i>Anggraini Sukmawati, Farida R. Dewi, Anik Djuraidah, Lucia Cyrilla</i>	474
Strategi Dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Perdesaan Dan Perkotaan Di Propinsi Jawa Barat - <i>Alla Asmara, M. Parulian Hutagaol, Ibrahim Isytar</i>	484
Kemitraan Pemasaran Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan: Ide, Langkah Dan Pelaksanaan Kasus Di Pangkalan Pendaratan Ikan Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah - <i>Suharno</i>	495
INDEKS PENELITI	v

**MODEL PEMBERDAYAAN PETANI DALAM MEWUJUDKAN
DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA
(KAJIAN KEBIJAKAN DAN SOSIAL EKONOMI TENTANG
KETAHANAN PANGAN PADA KOMUNITAS DESA RAWAN PANGAN
DI JAWA)**

the Model of Farmer Empowerment to Speed up the Farmer's Self-Supportiveness
and the Sustainability of Household
(Policy and Socioeconomic Studies of Food Security on the Food-Vulnerable
Village Community at Java)

Titik Sumarti

Dep. Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia-IPB

ABSTRAK

Masalah ketahanan pangan dan juga masalah kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah pembangunan masyarakat pedesaan. Sehingga arah pembangunan ketahanan pangan seharusnya difokuskan pada upaya-upaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di pedesaan, khususnya keluarga (rumah tangga) petani gurem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan indikator keberhasilan pemberdayaan kelompok afinitas, perkembangan kelompok di kabupaten Garut relatif lebih baik dibandingkan di kabupaten Klaten; (2) Salah satu faktor penentu keberhasilan adalah kesesuaian antara usaha yang dikembangkan dengan kontekstual setempat, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi politik dan ekologi tata kelola ketahanan pangan masyarakat; (3) Kelembagaan ketahanan pangan (kelompok afinitas) mengalami perkembangan yang berbeda di tiap wilayah mengikuti tahap persiapan dan penumbuhan kelompok sebelumnya, dan dipengaruhi oleh kelembagaan asli dan kelembagaan atas desa. (4) Model pemberdayaan petani di setiap desa juga spesifik menurut dinamika masyarakat, perkembangan kelembagaan kelompok afinitas, serta tahapan perkembangan implementasi program mapan. Situasi konflik politik dan kepentingan aktor turut mempengaruhi kegiatan pemberdayaan petani.

Kata kunci : Ketahanan pangan, kelembagaan, pemberdayaan petani.

ABSTRACT

The issues of food security and poverty are basically the problems that exist in rural community development. The course of the food security development should be more directed toward efforts to empower and prosper the rural community, especially at household level around subsistent farmers. The objective of this research was to formulate the model of farmer empowerment to speed up the farmer's self-supportiveness and the sustainability of household as well as national food security. The farmer empowerment is the way for farmer's participation in the programs of food security, so that the farmers themselves can achieve self-supporting prosperous village. According to the activity success indicators used to measure the aspect of affinity group empowerment; it was revealed that the group development in Garut district was relatively better than in Klaten district. One of the factors that determined the success of group affinity development was the suitability between the venture developed by group member with the local context; which was influenced by the socio-economic and political dynamics and local ecology of the community food security management. Food security institution (affinity group) experienced different development in every area; all followed the

preparation and promotion stages that had been previously implemented and it was influenced also by the indigenous institution and village institution. The model of farmer empowerment in every village was specific to the community dynamics, the development of affinity group institution, and the staging of the self-supportive program implementation.

Keywords : Farmer, empowerment, food security.

PENDAHULUAN

Masalah ketahanan pangan pada hakikatnya terkait erat dengan masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebanyak 39,05 juta (17,75 %). Sebagian besar (63,41%) penduduk miskin berada di pedesaan dan pada umumnya bergantung pada sektor pertanian¹, sebagai petani gurem serta rentan terhadap kerawanan pangan.

Secara empiris telah banyak dibuktikan bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan hingga saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Secara mendasar kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan dan program pembangunan pertanian cenderung bercorak terpusat, searah (*top-down*) dan seragam. Selain itu orientasi pembangunan pertanian didominasi pada upaya membangun *fisik* dan *kapital* (peningkatan produksi, produktivitas, dll.), sementara upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani termarginalkan. Kondisi ketidakberdayaan petani tercermin dari lemahnya kapasitas diri, kapasitas kelembagaan lokal dan jaringan dalam : (1) memecahkan masalah-masalah yang ada dengan kekuatan sendiri (*selfhelp*), dan (2) mengimplementasikan program-program pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan ketahanan pangan pada khususnya.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka sebagaimana dikemukakan Pakpahan dkk. (2006), menjadi perlu adanya upaya dan tindakan konkrit untuk membangun sebuah ideologi pembangunan pertanian berkeadilan yang dapat mempertemukan dan mengharmoniskan antara kepentingan negara (pemerintah) dengan kepentingan petani. Pada dasarnya pembangunan pertanian yang ideal

¹ Berita Resmi Statistik No.47/IX/ 1 September 2006 tentang Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2005-2006.

akan dapat diwujudkan jika bersendikan pada "kemandirian" dan "keberpihakan", dalam pengertian petani seharusnya diberdayakan untuk mandiri dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan usaha pertaniannya dan pemerintah memberikan dukungan dan keberpihakan untuk mewujudkan kemandirian tersebut. Sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif untuk mempercepat pemecahan masalah pembangunan pertanian, khususnya ketahanan pangan di pedesaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model dan strategi pemberdayaan petani yang telah dilakukan para aktor menurut spesifik lokasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di dua kabupaten lokasi program aksi desa mandiri pangan (program Mapan), yaitu kabupaten Garut provinsi Jawa Barat (kasus berhasil) dan kabupaten Klaten provinsi Jawa Tengah (kasus gagal). Di setiap kabupaten ditentukan dua desa rawan pangan berbeda tipologi: dataran tinggi (pertanian) dan dataran rendah (lahan kering, pesisir). Metode penelitian adalah kualitatif dengan studi kasus desa. Metode pengumpulan data dengan focus group discussion, wawancara mendalam dan pengamatan berpartisipasi.

Prosedur pengumpulan data dan strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Kegiatan	Sumber data	Teknik Pengumpulan data
Mengkaji pemberdayaan kelompok afinitas	Data primer dan didukung data sekunder dari: kelompok afinitas	Wawancara pengelola (pengurus) dan diskusi kelompok terbatas
Merumuskan model pemberdayaan petani yang telah dilakukan para aktor menurut spesifik lokasi.	Data primer	Sarasehan dengan masing-masing aktor (pemerintah, swasta, komunitas) pada setiap lokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Indikator keberhasilan *pemberdayaan kelompok afinitas* pada tahap perkembangan: (1) terlaksananya pelatihan teknis bagi kelompok afinitas, (2) terlaksananya program kerja pendampingan, (3) terlaksananya kegiatan magang, (4) peningkatan akses (permodalan dan pemasaran), (5) terlaksananya kegiatan pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perkembangan kelompok afinitas hingga tahun ketiga di desa dataran tinggi lebih baik dibandingkan desa pesisir.

Kabupaten Garut: Kasus Program Mapan Berhasil

Terkait dengan pelatihan teknis yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa implementasi program Desa Mapan telah berhasil menangkap aspirasi dan kebutuhan riil kelompok-kelompok afinitas dalam upaya meningkatkan usahanya. Permasalahannya adalah Badan Ketahanan Pangan – Dinas Pertanian dan dinas terkait lainnya belum optimal dalam merespon kebutuhan kelompok-kelompok afinitas dalam hal peningkatan kemampuan teknis. Kondisi ini disebabkan oleh masalah keterbatasan dana, keterbatasan sumberdaya manusia, dan masih kentalnya kepentingan “ego-sektoral” diantara dinas terkait di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan program kerja pendampingan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, upaya untuk mengembangkan usaha kelompok-kelompok afinitas agar mampu meningkatkan pendapatan yang layak secara ekonomis tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada para pendamping dan Tim Pangan Desa. Terdapat fakta bahwa para pendamping dan Tim Pangan Desa memiliki keterbatasan dalam hal “dukungan” dalam hal dana, pengetahuan, keterampilan dan jaringan. Oleh karena itu dinas/instansi terkait supra-desa yang terkait dengan Program Desa Mapan seyogyanya memberikan “dukungan penuh” kepada Pendamping dan Tim Pangan Desa selaku “ujung tombak” pelaksana program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan akses terutama pada aspek peningkatan *permodalan kelompok* dan komunitas. Sedangkan peningkatan akses pemasaran produksi kelompok dan komunitas terjadi meskipun dalam skala dan lingkup yang terbatas. (Tabel 1 dan Tabel 2). Terdapat kasus dimana anggota kelompok melakukan diversifikasi jenis komoditas pertanian, yaitu menanam komoditas tanaman jagung dan kacang tanah. Dengan diversifikasi tanaman mereka tidak mengalami kerugian, dan bahkan masih mampu mengembalikan modal PMUK.

Salah satu indikator keberhasilan pada tahap pengembangan adalah terlaksananya kegiatan pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan pengembangan (diversifikasi) usaha telah mulai terjadi di kedua lokasi, walau dengan catatan masih dalam lingkup yang terbatas. Khusus bagi para anggota yang usahanya bergerak di bidang pertanian, penambahan modal PMUK di Desa dataran tinggi telah mampu mengurangi dan bahkan hingga “mematikan” usaha Bank Keliling yang dipandang sebagian besar warga banyak merugikan para petani.

Tabel 1. Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Periode Bulan Oktober 2008) di Desa Pesisir Kabupaten Garut

No	Lokasi Komunitas	Nama Kelompok	Perkembangan									
			Modal Awal		Modal Sekarang		Jenis Usaha		Anggota		LKM/LKD	
			PMUK	PMUK	Tabungan	Jasa	Awal	Skrng	Awal	Skrng	Awal	Skrng *)
1.	Kp. Taman Nalusu	Sawargi	12.500.000	12.500.000	1.200.000	4.000.000	Ikan hias Rumput Laut	Padi Gogo Palawija Warung Nasi Uduk	20	26	0	3.330.000
2.	Kp. Cicadas Mukti	Sugih	12.500.000	12.500.000	865.000	4.000.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	23	27	0	1.560.000
3.	Kp. Gunung Sulah	Bina Sejahtera	14.500.000	14.500.000	525.000	4.640.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	28	34	0	2.412.000
4.	Kp. Sanding	Bina Mukti	14.000.000	14.000.000	640.000	4.480.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	25	52	0	2.500.000
5.	Kp. Bopong Karya	Wiguna	12.500.000	12.500.000	660.000	4.000.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	20	30	0	2.470.000
6.	Kp. Gunung Sulah	Karya Mukti	14.000.000	14.000.000	745.000	4.480.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	25	27	0	780.000
7.	Total		80.000.000	80.000.000	4.635.000	25.600.000			141	196	0	13.052.000

Keterangan : *) Kondisi keuangan yang ada di LKD yang tercatat sebanyak Rp 13.052.000.- itu adalah merupakan dana yang ada di kas LKD pada saat ini setelah digulirkan kembali kepada anggota kelompok yang baru. Terdapat kasus dimana anggota-anggota kelompok afinitas yang memiliki usaha pada kegiatan perladangan (khususnya padi huma) mengalami kegagalan panen akibat kekeringan pada masa tanam tahun 2007. Sehingga tidak semua anggota kelompok mampu mengembalikan pinjaman PMUK. Pemecahannya adalah dengan jalan mereka wajib mengembalikan jasa saja, sedangkan cicilan PMUK wajib dikembalikan pada masa tanam sekarang (masa tanam tahun 2008).

Tabel 2. Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Periode Bulan Oktober 2008) di Desa Dataran Tinggi Kabupaten Garut

No	Lokasi Komunitas	Nama Kelompok	Perkembangan									
			Modal Awal	Modal Sekarang		Jenis Usaha		Anggota		LKM/LKD		
			PMUK	PMUK	Tabungan	Jasa	Awal	Skrng	Awal	Skrng	Awal	Skrng
1.	Kp. Kancil	Karya Tani	10.000.000	10.000.000	663.000		Pipiti, Bilik Bambu,	Pedagang Keliling, warung, SP	11	52	80.000.000	107.955.250
2.	Kp. Singkup	Sekar Tani	10.000.000	10.000.000	681.000		Gula Aren	Warung, Pedagang Keliling	15	50		
3.	Kp. Padaimut	Mulya Tani	20.000.000	20.000.000	690.000		Ternak Domba	Makanan Olahan, Warung, Pedagang, SP	29	72		
4.	Kp. Cikondang	Mekar Tani	10.000.000	10.000.000	689.000		Makanan Olahan	Warung, Pedagang, SP	13	59		
5.	Kp. Singkup	Berkah Tani	10.000.000	10.000.000	674.000		Gula Aren	Warung	11	53		
6.	Kp. Kamasri	Hegar Tani	10.000.000	10.000.000	652.000		Makanan Olahan	Warung	12	44		
7.	Kp. Cibarug	Bakti Tani	10.000.000	10.000.000	632.000		Pupuk, Saprotan	Gula Merah, Warung, Pedagang Keliling, Simpan Pinjam	8	45		
8	Total		80.000.000	80.000.000	4.681.000				99	375	80.000.000	107.955.250

Kabupaten Klaten: Kasus Program Mapan Gagal

Pelatihan tehnik bagi kelompok afinitas antara lain pelatihan teknik perpaduan warna pada kain tenun ATBM, pembuatan aneka criping, dan pelatihan pemeliharaan kambing dan ayam. Namun usaha kain tenun ATBM masih mendapat tantangan cukup berat, baik dari sisi kebiasaan bertenun, pemasaran, dan perputaran modal yang dianggap oleh penenun tradisional masih lebih mudah dengan menggunakan cara tradisional. Dalam hal pembuatan aneka criping, sampai saat ini kelompok tersebut baru dapat menghasilkan criping gadung mentah (jrangking) dan belum mampu memproses menjadi criping gadung goreng (siap makan) dan dikemas dalam plastik. Tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan bahan baku gadung.

Kegiatan pendampingan yang selama ini dilakukan oleh pendamping hanya sisi manajemen administrasi kelompok dan tidak menyentuh sama sekali terhadap

hal-hal teknis karena memang kelemahannya adalah tidak disediakan pendamping teknis. Dalam proses pembentukan Tim Pangan Desa di dua desa didasarkan atas penunjukan dari Kepala Desa. Kelembagaan TPD di kedua desa belum berfungsi walaupun sudah beberapa kali diberikan pelatihan baik di kabupaten maupun di tingkat propinsi. Konflik internal di desa dataran rendah yang terjadi pasca pilkades harus diakui sangat mempengaruhi jalannya komunikasi antar sesama anggota TPD. Hal ini menunjukkan bahwa program belum cukup berhasil, baik dari sisi kegiatan usahanya, pengorganisasian kelompok, keberfungsian kelembagaan bentukan program, maupun dalam hal pendampingan (Tabel 3.)

Tabel 3. Perkembangan Usaha Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tahun 2008

No	Nama Kelompok Afinitas (Jumlah Anggota)	Data Perkembangan Usaha Periode Bulan	
		Juli 2007	Juli 2008
1.	Tri Jaya Perkasa (15 Orang)	Modal Awal Rp. 24.750.000,- Modal tersebut dimanfaatkan utk beternak Kambing Betina sebanyak 45 ekor dgn harga @ Rp.412.500,-	Jumlah ternak berkembang menjadi 67 ekor (induk + anakan) dan 6 ekor diantaranya mati karena keracunan dan terkena penyakit.
2.	Subur (20 Orang)	Modal Awal Rp. 25.000.000,-	Modal saat ini berkembang menjadi Rp. 29.239.235.-
3.	Mekarsari (25 Orang)	Modal Awal Rp. 30.250.000,- Dimanfaatkan untuk usaha tenun. Modal tersebut dibelanjakan utk membeli kain sebanyak 70 gendok (400m), @ Rp 7000,- (per 15 hari) 70 x Rp7000 = Rp 490.000,- Modal = Rp 232.000,- Untung =Rp 258.000,-	Modal saat ini berkembang menjadi Rp.35.574.500. Jumlah gendok berkembang menjadi 140 gendok (800m), @ Rp 7000,- (per 15 hari) 140 x Rp7000 = Rp 980.000,- Modal = Rp 464.000,- Untung = Rp 516.000,-

Model Pemberdayaan Petani Kabupaten Garut: Kasus Program Mapan Berhasil

Peningkatan Kapasitas Diri Petani

Berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan jelas terlihat bahwa kapasitas diri petani pada umumnya masih relatif tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari kemampuan petani dalam hal : 1) **Politik** ; yakni petani mampu berperan setara dalam dalam proses pembangunan, 2) **Sosial** ; pengembangan kelembagaan (organisasi petani), 3) **Ekonomi**, peningkatan kesejahteraan rumahtangga (kemampuan daya beli rumah tangga dan nilai tukar petani, 4) **Kesehatan**, terpenuhinya kebutuhan pangan secara mencukupi, berimbang dan bergizi. Terkait upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan petani di kedua desa, nampak bahwa petani di Desa dataran tinggi relatif lebih kuat di bidang ekonomi, sedangkan petani di Desa dataran rendah relatif lebih kuat di bidang politik.

Upaya peningkatan ketahanan pangan di Desa dataran tinggi nampaknya tidak lagi dapat difokuskan pada peningkatan produksi pertanian, melainkan diarahkan pada penguatan kekuatan daya beli rumah tangga petani. Hal ini berarti bahwa pengembangan sektor pertanian perlu digeser dari peningkatan produksi (*on-farm*), kepada peningkatan pendapatan di pasca produksi (*off-farm*). Upaya-upaya kongkrit untuk mendorong lahirnya industri kecil skala rumah tangga selain akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dapat membuka lapangan pekerjaan di tingkat komunitas. Jika upaya ini dapat dilakukan dengan baik, maka pada akhirnya akan berdampak positif pada upaya mengurangi tingginya tingkat urbanisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Berbeda dengan kondisi di Desa dataran tinggi, kondisi kapasitas petani di Desa pesisir lebih kuat dari aspek politik. Para petani sudah mampu mengorganisasikan diri untuk meningkatkan kekuatan posisi tawar menawar dengan pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan sumberdaya lahan di wilayahnya. Upaya penguatan ketahanan pangan masih memberi peluang yang cukup besar pada aspek peningkatan produktivitas.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Secara umum kondisi kapasitas kelembagaan (lokal dan formal) di Desa dataran tinggi lebih baik dibandingkan Desa pesisir. Upaya untuk merintis pembangunan Lembaga Keuangan Mikro Desa (LKMD) di desa dataran tinggi sudah dimulai dengan program UP2K, selanjutnya diperkuat oleh program Raksa Desa dengan bantuan modal sebesar Rp 100 juta untuk kegiatan ekonomi bergulir. Sedangkan di Desa pesisir, Lembaga Keuangan Desa (LKD) baru mulai dirintis saat implementasi Program Desa Mapan. Sebelum adanya program Desa Mapan, program dana bergulir selalu mengalami kemacetan. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya kapasitas diri dan kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, seyogyanya untuk kasus Desa dataran tinggi upaya penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada peningkatan kapasitas LKD. Dalam hal ini, jika memungkinkan LKD yang sudah terbentuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi setingkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sedangkan untuk kasus Desa pesisir, upaya penguatan kelembagaan seyogyanya diarahkan untuk “mempertahankan” dan “meningkatkan” kapasitas Lembaga Pemerintah Desa, Tim Pangan Desa, LKD dan juga kelompok-kelompok afinitas karena memiliki potensi untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat mulai tumbuhnya generasi muda yang cerdas, kritis dan kreatif dalam mencari jalan keluar bagi masalah sosial, ekonomi dan politik di lingkungannya.

Peningkatan Kapasitas Jaringan

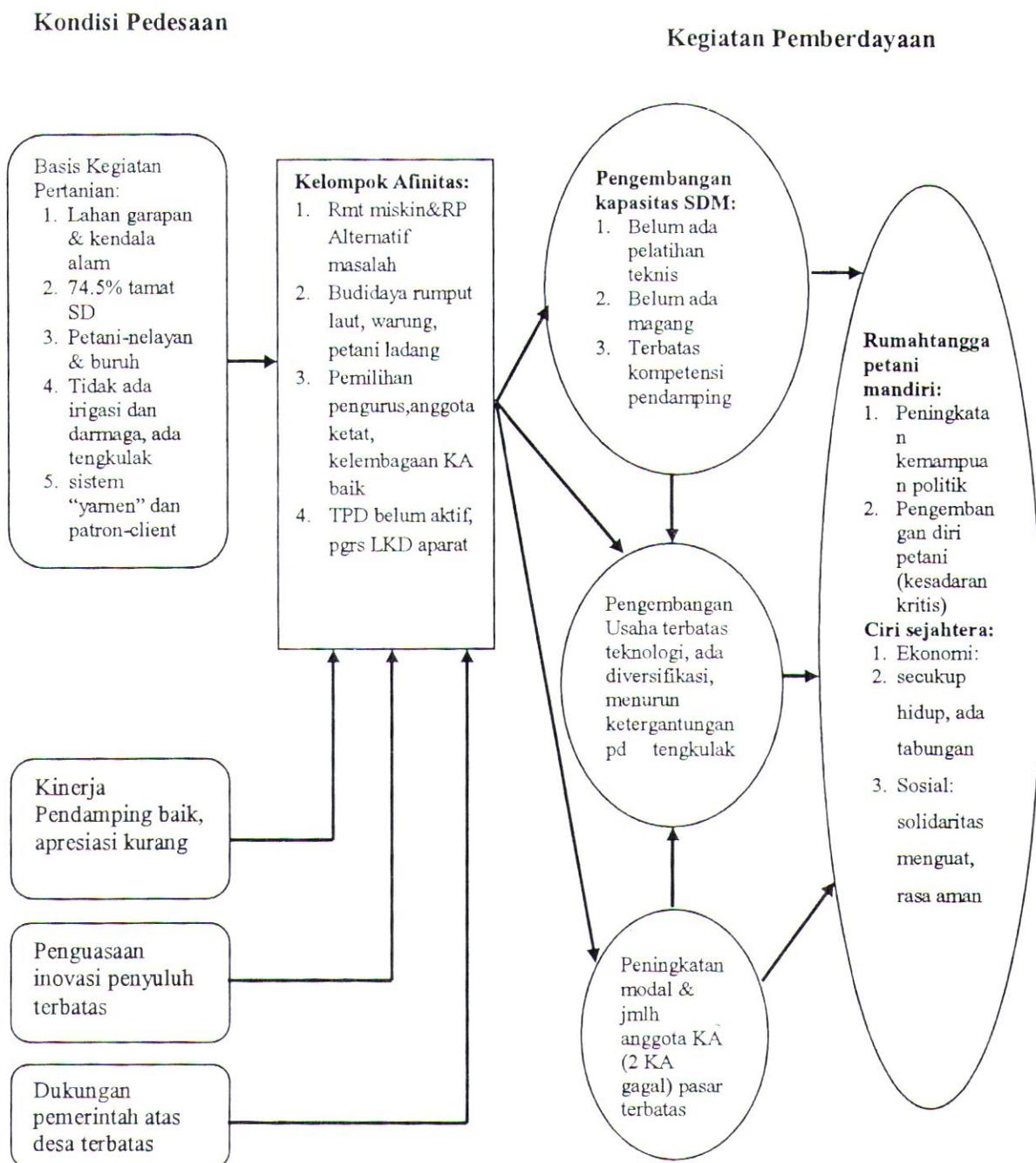
Ditinjau dari aspek peningkatan kapasitas jaringan, nampak bahwa posisi kapasitas jaringan kedua desa masih tergolong lemah. Meski demikian, mengingat posisi dan jarak Desa dataran tinggi yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten dan Provinsi serta memiliki aksesibilitas yang lebih baik, maka kapasitas jaringan desa dataran tinggi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan pesisir.

Hingga sejauh ini, jaringan yang terbentuk masih didominasi oleh jaringan antara instansi pemerintah supra-desa dengan pemerintah desa. Belum terlihat adanya jaringan yang kuat terbangun antara pihak masyarakat desa dengan pihak

swasta, LSM dan perguruan tinggi. Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, dinas/instansi terkait di tingkat Kabupaten Garut (Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Kantor SDM-KP, Dinas Koperasi, dll) dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak pendamping dan koordinator BPP agar keduanya dapat menjadi “jembatan yang kokoh” bagi masyarakat desa untuk memperluas jejaring kerjasamanya. (Tabel 4).

Tabel 4. Matriks kegiatan pemberdayaan petani kasus desa dataran tinggi dan pesisir kabupaten Garut

No	Uraian	Desa Dataran Tinggi	Desa Pesisir
1.	Pengembangan kapasitas SDM	Ada pelatihan secara swadaya kerajinan “pipiti”, sudah ada kegiatan magang yang dilakukan PPL terkait keberhasilan pengembangan kelompok afinitas di lokasi lain. Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik, terkendala keterbatasan kapasitas pendamping, TPD belum berfungsi dengan baik, LKD berjalan baik	Belum ada pelatihan, padahal dibutuhkan untuk kelompok afinitas pelatihan sesuai kebutuhan: pengolahan hasil laut. Belum ada kegiatan magang bagi pendamping, anggota. Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik, terkendala keterbatasan kapasitas pendamping, TPD belum berfungsi dengan baik, LKD juga belum berjalan baik
2.	Pengembangan kelembagaan	Relatif ada pengembangan usaha dan diversifikasi usaha, tidak tergantung lagi pada bank keliling	Pengembangan usaha dibatasi teknologi, ada diversifikasi: pedagang nasi uduk, warungan. Tidak lagi terjerat hutang pada tengkulak
3.	Pengembangan jaringan	Terjadi peningkatan akses pada permodalan kelompok, jumlah anggota dan tabungan kelompok, cadangan modal LKD. Pemasaran masih terbatas.	Terjadi peningkatan akses pada permodalan kelompok, jumlah anggota dan tabungan kelompok (2 KA gagal). Pemasaran masih terbatas karena kendala teknologi.

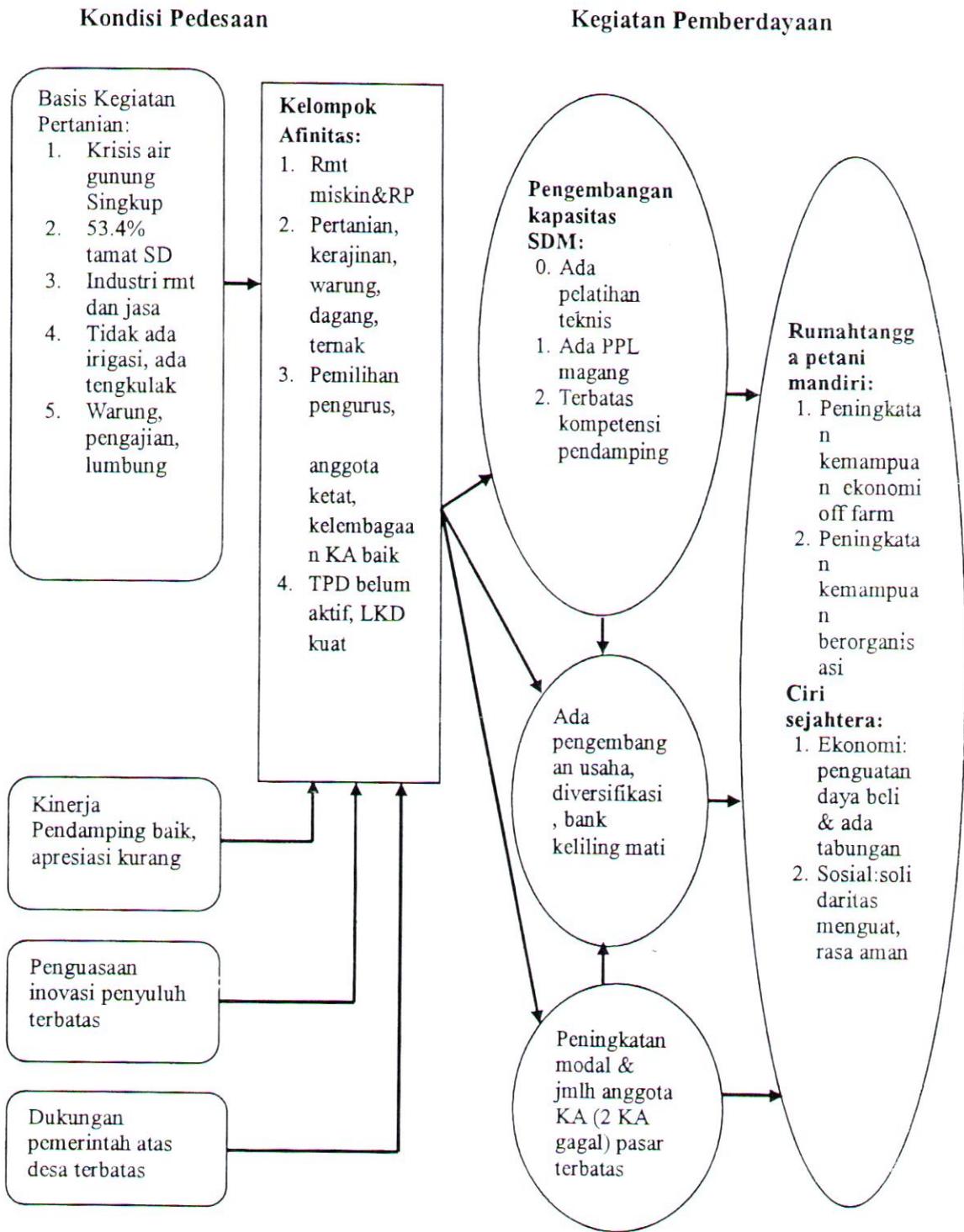


Gambar 1. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Garut (tahap pengembangan)

Model Pemberdayaan Petani Kabupaten Klaten: Kasus Program Mapan Gagal

Kapasitas Diri

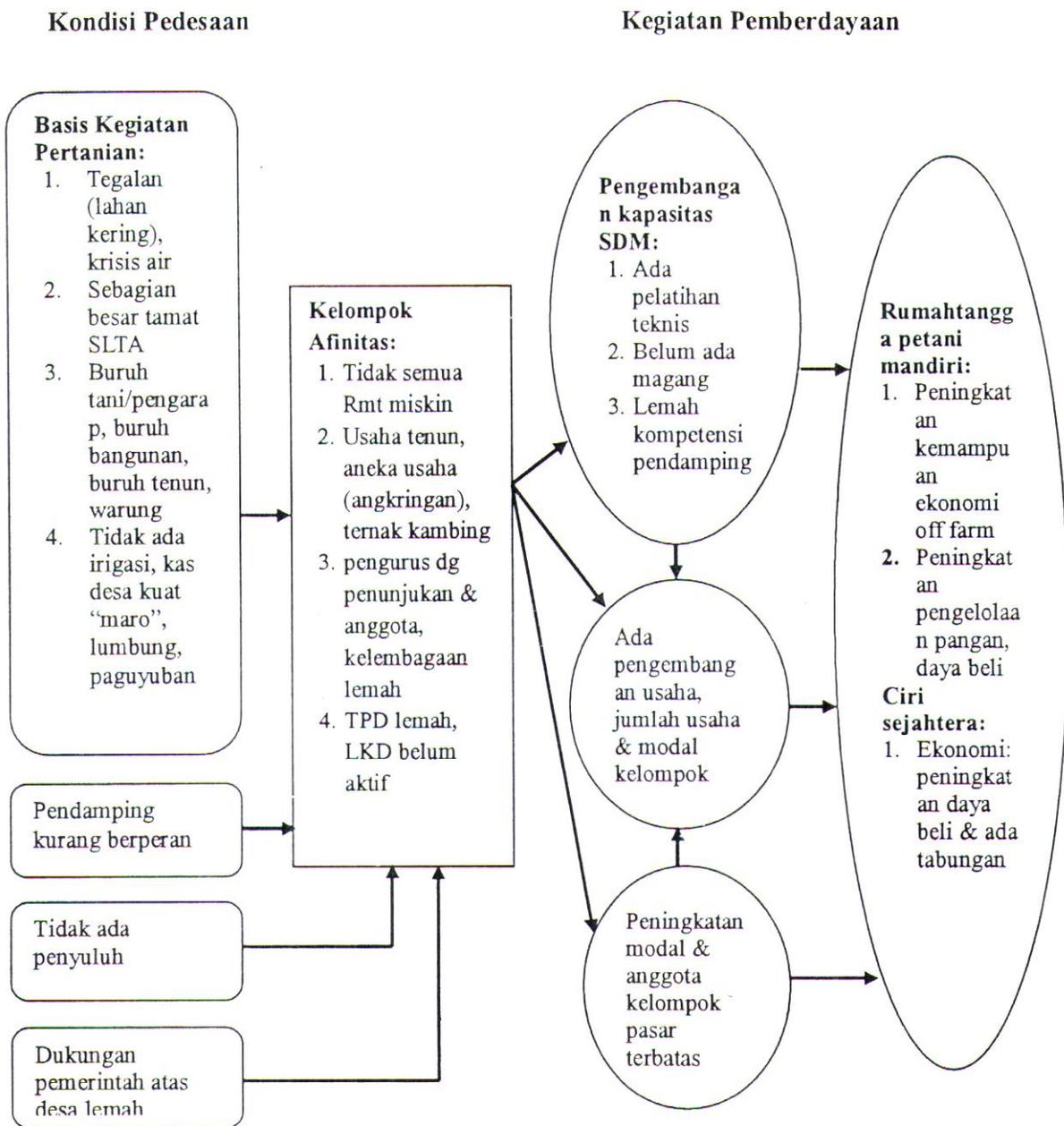
Secara umum kondisi kapasitas diri petani miskin di Desa dataran rendah masih relatif rendah baik itu dalam kemampuan/keterampilan teknis di bidang



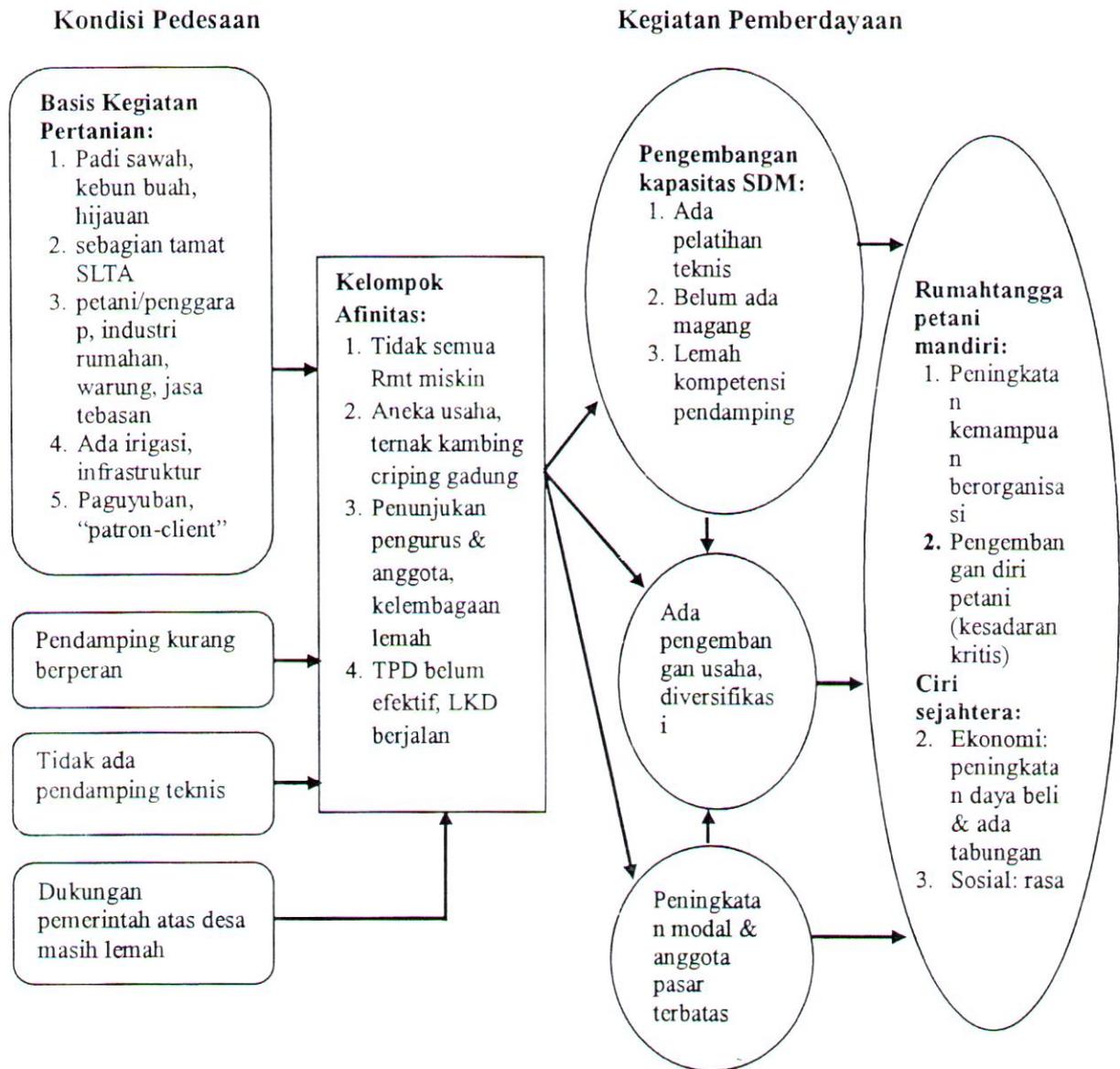
Gambar 2. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Garut (tahap pengembangan)

Pengembangan Jejaring

Posisi kapasitas jaringan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa dataran rendah tergolong lemah, terutama karena dari sisi letak geografisnya yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Meski demikian jika ditinjau dari sisi kedekatan dengan “pemegang kekuasaan”, maka tergolong relatif kuat, namun belum sepenuhnya berfihak kepada masyarakat miskin. Sementara itu untuk kasus Desa dataran tinggi terkait dengan program pemberdayaan yang masuk ke desa, jaringannya masih terbatas didominasi oleh jaringan antara pemerintah atas desa



Gambar 3. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Klaten (tahap pengembangan)



Gambar 4. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Klaten (tahap pengembangan)

KESIMPULAN

- 1 Model pemberdayaan Desa Mandiri Pangan ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani, dengan mengutamakan ciri ekonomi (modal) pada tahap pengembangan. Strategi pemberdayaan bertumpu pada pembentukan kelompok untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha dengan dukungan pendamping, PPL, tim pangan desa, tim koord. ketahanan pangan Kabupaten.

- 2 Model pemberdayaan petani di tingkat komunitas berkembang spesifik menurut : a). kondisi dinamika sosial, ekonomi, budaya, politik dan ekologi komunitas, b). perkembangan kelembagaan ketahanan pangan dan, c). perkembangan tahap implementasi program mapan. Kegiatan pemberdayaan seyogyanya difokuskan dan bertumpu pada pemberdayaan rumahtangga petani dengan dukungan kelembagaan ketahanan pangan yang kuat, baik itu di level komunitas, desa dan kabupaten.
- 3 Strategi Pemberdayaan:
 - a. Strategi pemberdayaan petani difokuskan pada peningkatan kapasitas diri sumberdaya manusia petani miskin dan rawan pangan di bidang *kesadaran* sosial, budaya, ekonomi, budaya, politik dan ekologi dengan didukung oleh pelayanan dan pendampingan kelembagaan pemerintah lokal dan pemerintah “atas desa” yang kuat, adil, bersih, dan transparan.
 - b. Strategi pemberdayaan berikutnya adalah meningkatkan akses para rumahtangga petani miskin dan rawan pangan terhadap sumber-sumber kehidupan (modal manusia, modal ekonomi, modal sosial dan modal alam), serta pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial).
 - c. Kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah ada di tiap komunitas (Lumbung Paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sangat penting, karena lumbung paceklik selain berfungsi sebagai “benteng utama” masyarakat dalam menghadapi masalah paceklik/kerawanan pangan, juga sebagai “ciri/perlambang” dari tegaknya kedaulatan dan solidaritas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani di pedesaan.
 - d. Perlu adanya upaya-upaya kongkrit untuk mereduksi adanya “ego sektoral” pada dinas/instansi pemerintah, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi (ekonomi dan sosial) dalam implementasi program.
 - e. Strategi implementasi perlu meningkatkan perhatiannya kepada aspek keberlanjutan lingkungan/sumberdaya alam, agar mampu memberi manfaat bagi kebutuhan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009*. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Handewi, P.S. Rachman dan Mewa Ariani. 2002. *Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi*. FAE. Vol 20. No.1 . Juli 2002.
- Hardinsyah. 2001. *Pembangunan Pangan di Era Ekonomi Daerah Prosuding Dialog dan Loka Karya Kebijakan dan Program Pangan, Ketahanan Pangan di Era Ekonomi..* Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB. Bogor.
- Israel, Arturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman Proyek-Proyek Dunia*. LP3ES. Jakarta.
- Pakpahan, Agus. dkk. 2004. *Membangun Pertanian Indonesia : Bekerja, Bermartabat dan Sejahtera*. DPP Himpunan Alumni IPB.
- Pranadji, Tri. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Membangun Pertanian dan Pedesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Badan Litbang dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pranarka, AMW dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) didalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Disunting oleh Onny S. Projono dan AMW Pranarka. CSIS. Jakarta.
- Sajogjo. 1982. "Modernization Without Development in Rural Java." *The Journal of Social Studies*. 1982. Dacca, Bangladesh.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama Bandung.